



KEBERADAAN PROGRAM SIARAN LOKAL DI TELEVISI BERJARINGAN

(STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MEDIA TERHADAP PROTV)

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 1

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Nama : Eva Ratna Hari Putri

NIM : 14030110130116

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014

ABSTRAK

Judul Skripsi :Keberadaan Program Siaran Lokal di Televisi Berjaringan
(Studi Implementasi Kebijakan Media Terhadap PROTV)
Nama : Eva Ratna Hari Putri
NIM : 14030110130116

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan kebijakan media yang memuat mengenai Sistem Siaran Jaringan (SSJ).

Undang-undang penyiaran tersebut mengamanatkan bahwa televisi swasta yang mengudara secara nasional wajib mendirikan badan hukum baru, melepas stasiun relai, melepas saham secara bertahap serta pancaran siaran tidak boleh dilakukan dengan pancaran siaran relai. Sistem Stasiun Jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antarlembaga penyiaran. Salah satu televisi lokal di Semarang yang bergabung dengan Sistem Stasiun Jaringan yaitu *PROTV* yang berjaringan dengan *SINDO TV*.

Kebijakan ini lahir dengan semangat *diversity of content* (keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (keberagaman pemilik), yang menjelaskan bahwa semakin beragam isi siaran dan semakin beragam distribusi kepemilikan media maka ranah penyiaran akan semakin demokratis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kebijakan sistem stasiun jaringan dan keberadaan program siaran lokal di *PROTV*.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi sistem stasiun jaringan di *PROTV* sebagai anggota jaringan *SINDOTV* belum berjalan dengan ideal. Faktor kepemilikan menyebabkan adanya dominasi kekuasaan dari pemilik modal melalui berbagai keputusan yang memengaruhi keberadaan program siaran lokal. Terjadi pengurangan *slot time* bagi program siaran lokal dan pergeseran *prime time* program siaran lokal di *PROTV*.

Kata kunci: sistem stasiun jaringan, program siaran lokal, keberagaman

ABSTRACT

Title : *Existence Of Local Broadcasted Program in Network Television (Study Of Media Policy Implementation towards PROTV)*
Name : Eva Ratna Hari Putri
NIM : 14030110130116

Law No. 32 of 2002 on broadcasting, Government Regulation No. 50 of 2005 concerning the broadcasting operation of Private Broadcasters, Regulations of the Minister of Communications and Informatics Republic of Indonesia number 43 of 2009 concerning Broadcasting Operation of Network Station Systems for Private Television Broadcasters, and Guidance of Broadcasted Program Standard and Broadcasting Behavior (P3SPS) are media policies regarding Network Broadcasting System (SSJ).

The policies on broadcasting above require the currently broadcasting private televisions to, nationally, start up a new law institution, and to gradually release their relay station and stocks. Furthermore, private broadcasting televisions should not air in broadcast relay. SSJ is a regulation regulating broadcast relay of broadcasting institutions one of which is PROTV. PROTV is a local private television located in Semarang and is a network of SINDO TV.

The policy is derived by diversity of content and diversity of ownership spirit. The spirits hold a notion that the greater the content of the broadcast and the media ownership, the more democratic of broadcasting area will be. The aim of the research was to evaluate the practice of the policy and regulations of network station system applied in PROTV and the existence of its local broadcasted programs.

The result of the research revealed that the implementation of network station system in PROTV as a network of SINDOTV had not been properly run. The conclusion was based on the fact that ownership matter was being the main factor in the decision making. The decision making regarding the airing time of the programs in PROTV was dominated by the stocks' holder. Therefore, there were subtraction in slot time of some programs and change in the prime time program.

Key words: *network station system, local broadcasted program, diversity*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan kebijakan media yang memuat mengenai Sistem Siaran Jaringan (SSJ). Undang-undang penyiaran tersebut mengamankan bahwa televisi swasta yang mengudara secara nasional wajib mendirikan badan hukum baru, melepas stasiun relai, melepas saham secara bertahap serta pancaran siaran tidak boleh dilakukan dengan pancaran siaran relai.

PROTV merupakan contoh televisi lokal di Semarang yang durasi siarannya lebih didominasi oleh program dari *provider*. Televisi lokal ini yang berjaringan dengan *SINDO TV* yang memiliki durasi siaran 4 jam dalam sehari yaitu pukul 16.00-19.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan program dari *SINDO TV* dan pukul 22.00-23.00 WIB kembali ditayangkan program siaran lokal. *PROTV* merupakan televisi lokal yang pertama kali mengudara pada 8 Februari 2004 dan akhirnya bergabung dengan *SUN TV Network* yang saat ini berganti nama menjadi *SINDO TV* pada 16 April 2008.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Bab XXV mengenai Program Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan pasal 68 ayat 1 menjelaskan bahwa: “*Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari*”.

P3SPS mengenai Program Lokal dalam Sistem Stasiun Jaringan Pasal 68 ayat 2 menjelaskan bahwa: “*Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat*”.

Perumusan Masalah

Program siaran lokal yang disiarkan oleh *PROTV* tidak melanggar aturan mengenai program siaran lokal dalam P3SPS yaitu minimal program siaran lokal yang disiarkan oleh sistem stasiun jaringan adalah 10% (sepuluh persen). Namun menurut Peraturan Menteri sebenarnya jumlah tersebut merupakan jumlah minimal dan dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi 50 persen program siaran lokal.

Terkait dengan penayangan program siaran lokal di *PROTV*, yaitu pada sore hari pukul 16.00-19.00 WIB dan malam hari pukul 22.00-23.00 WIB. *PROTV*

menayangkan program siaran lokal pada waktu *prime time* hanya satu jam per hari yaitu pukul 18.00-19.00 WIB dan seringkali program yang ditayangkan merupakan program produksi lama dan disiarkan secara berulang-ulang.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas masalah seperti yang telah dirumuskan yaitu Bagaimana implementasi kebijakan sistem stasiun jaringan dan Bagaimana muatan serta keberadaan program siaran lokal di *PROTV*?

Demokrasi Media

Media sering dilihat oleh publik sebagai saluran hiburan semata. Masyarakat seringkali tidak menyadari peran sentral yang dimainkan oleh media dalam penguatan nilai-nilai yang sangat penting dalam fungsi demokrasi. Literasi media dapat memainkan peran penting untuk memperkuat komitmen publik dalam Demokrasi Media. Meskipun proyek Demokrasi Media memerlukan masukan dari kelompok masyarakat dan gerakan reformasi media, keberlanjutan jangka panjang didasarkan pada dukungan publik yang membentuk Demokrasi Media (Littlejohn dan Foss, 2009:627-630). Kebijakan sistem stasiun jaringan memiliki relasi erat dengan Demokrasi Media. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam rangka mewujudkan ranah penyiaran yang demokratis.

Teori Ekonomi Politik

Dalam arti sempit ekonomi politik adalah ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan antar kekuasaan yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk sumber daya komunikasi. Formulasi ini memiliki nilai praktis tertentu karena memberikan perhatian terhadap bagaimana komunikasi bisnis beroperasi. Definisi yang lebih umum adalah studi kontrol dan kelangsungan hidup dalam kehidupan sosial. (Mosco, 1996: 2-3).

Kebijakan Media

Media dipandu oleh kebijakan, undang-undang, standar teknis, dan *self-regulation*. Pemerintah mencerminkan kebijakan komunikasi dan pertimbangan publik dengan mengarahkan dan mengatur media sehingga dapat berkontribusi pada kepentingan publik. Kelompok perdagangan industri dan masyarakat kelompok kepentingan memantau kinerja media dan melobi pemerintah untuk mengubah kebijakan komunikasi. Kebijakan sering berubah menjadi undang-undang dalam rangka untuk membuat mereka mengikat secara hukum. Kebijakan yaitu kerangka kerja publik untuk menjaga dan mengatur media sehingga dapat berkontribusi untuk kepentingan publik (Straubhaar, Larose, dan Davenport, 2012: 445-456).

Metode Penelitian

Tipe penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan tipe deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat suatu penjelasan tentang kasus yang bersangkutan dan menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada terkait program siaran lokal di televisi berjaringan.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak *PROTV* Semarang yaitu Kepala Biro *PROTV*, Produser Program Produksi *PROTV* dan pihak *KPID* Jawa Tengah yaitu Anggota Komisioner *KPID* Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan subyek penelitian yaitu pihak *PROTV* dan *KPID* Jawa Tengah.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal *PROTV* yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui arsip dari sumber internal maupun eksternal *PROTV*, buku, artikel, publikasi berbagai lembaga maupun internet yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara tatap muka (*one to one interview*) yang berupa *In-depth interview*.
- b. Studi Pustaka dan Dokumentasi yaitu mencari data dan informasi riset dari sumber tertulis, seperti membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dokumentasi administratif dan internal perusahaan (kebijakan

televisi, program-programnya) dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data

Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan peneliti di lapangan. Data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi diklarifikasikan ke dalam kategori tertentu. Analisis data kualitatif berkaitan dengan memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan mengkodekan, menyusunnya menjadi kategori dan merangkum menjadi pola dan susunan yang sederhana (reduksi data) dan mendapatkan makna dan pemahaman terhadap kata-kata dan tindakan para partisipan riset (interpretasi) (Yin, 2006:133).

Kesimpulan

Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) merupakan kebijakan yang ideal bagi ranah penyiaran Indonesia. Kebijakan ini akan menguntungkan secara ekonomi dan politik. Tujuannya yaitu mewujudkan *diversity of content* dan *diversity of ownership* dalam ranah penyiaran di Indonesia. Namun dalam implementasi kebijakan sistem stasiun jaringan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan politik. Implementasi sistem stasiun jaringan di *PROTV* sebagai anggota jaringan *SINDOTV* belum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari aspek kepemilikan dan keberadaan program siaran lokal yang belum ideal.

Praktik akuisisi yang dilakukan oleh *Group MNC* sebagai pemilik *SINDOTV* menyebabkan keterwakilan masyarakat daerah dalam kepemilikan saham masih sangat kurang. Praktik implementasi sistem stasiun jaringan di Indonesia cenderung mengarah ke pendekatan libertarian. Hal tersebut dapat dilihat dari dua aspek yang menjadi ciri libertarian yaitu kepemilikan yang bersifat pribadi dan lebih mengutamakan individu daripada masyarakat. Kepemilikan media televisi tetap berada di tangan *group* besar Jakarta, tentu *diversity of ownership* tidak terwujud.

Faktor kepemilikan tersebut berdampak pada keberadaan program siaran lokal di *PROTV* yang dapat dikatakan belum ideal. Secara politik *SINDOTV* memiliki hak untuk mengatur aktivitas penyiaran *PROTV*, hal ini membawa dampak berkurangnya keleluasaan *PROTV* dalam proses produksi siaran lokal di *PROTV*. *SINDOTV* melakukan intervensi dalam menentukan program siaran lokal di *PROTV*, diantaranya dalam menentukan *slot time*, durasi siaran, dan penempatan program siaran lokal.

Slot time program siaran lokal di *PROTV* ditentukan oleh *SINDOTV*, *slot time* akan diberikan *SINDOTV* dengan *target sales* yang harus dipenuhi oleh *PROTV*. Setelah berjejaring dengan *SINDOTV* terjadi pengurangan durasi siaran di *PROTV* dari 8 jam menjadi 4 jam. Program yang ditayangkan di *PROTV* hanya

diberikan kesempatan tayang pada *prime time* selama 1 jam.. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya program siaran lokal yang ditonton oleh masyarakat.

Dari sisi *content* nampaknya keberagaman belum mampu diwujudkan dengan baik. Kepentingan ekonomi dan politik seringkali menyebabkan adanya pertentangan antara ideologi media dengan kepentingan tersebut. Hal ini menyebabkan program siaran di *PROTV* harus sesuai dengan kebijakan *SINDOTV*. Adanya target untuk memperoleh keuntungan hingga tak jarang harus mengorbankan idealisme pengelola media dan kepentingan masyarakat. Aspek *content* juga dinilai mengarah ke libertarian, dari sisi pandang ini dapat dilihat bahwa *PROTV* lebih mementingkan kepentingan pribadi sebagai media yang berorientasi profit.

Keberadaan program siaran lokal di *PROTV* belum ideal sehingga tujuan sistem stasiun jaringan dari aspek *diversity of content* belum mampu diwujudkan dalam praktik implementasi sistem stasiun jaringan di *PROTV*.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi Akademis

Dari sudut pandang akademis, secara teoretis mengkaji implementasi sistem stasiun jaringan di *PROTV* dijelaskan dengan Teori Ekonomi Politik. Teori ini memfokuskan pada hubungan kekuasaan dapat mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya. Kekuasaan induk jaringan memengaruhi keberadaan program siaran lokal dengan adanya pengurangan durasi siar dan tidak memberikan *prime time* kepada anggota jaringan.

Dalam Ekonomi Politik terdapat pandangan liberal, yang kemudian disebut Ekonomi Politik Liberal. Pandangan ini berpusat pada isu pertukaran pasar di mana individu sebagai konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkannya. Media massa dilihat sebagai produk kebudayaan yang harus diberikan kesempatan secara bebas dan luas untuk dimiliki oleh siapapun dan untuk berkompetensi secara bebas (Mufid, 2005:83).

Namun implementasi sistem stasiun jaringan di *PROTV* tidak *concern* pada kebebasan seperti pandangan liberal. Kepemilikan saham dikuasai oleh induk jaringan yang merupakan bagian dari *group* media terbesar di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat lokal dalam hal kepemilikan media sangat kurang. Faktor kepemilikan tersebut menyebabkan adanya dominasi kekuasaan dari pemilik modal melalui berbagai keputusan yang memengaruhi keberadaan program siaran lokal. Akhirnya masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih, program siaran di televisi tetap di dominasi oleh program Jakarta.

Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti melihat adanya dominasi kekuasaan dalam kerjasama sistem stasiun jaringan yang dilakukan induk jaringan sehingga memengaruhi keberadaan program siaran lokal di *PROTV*. Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat perlunya negosiasi ulang terkait MOU kerjasama antara induk jaringan dan anggota jaringan. *PROTV* perlu melibatkan berbagai pihak seperti KPID, LSM, dan pihak lain yang terkait untuk melakukan diskusi dan membuat MOU kesepakatan ulang agar dapat menghasilkan kerjasama sistem stasiun jaringan yang saling menguntungkan antara induk dan anggota jaringan.

SINDOTV sebagai induk jaringan diharapkan dapat melaksanakan implementasi sistem stasiun jaringan sesuai dengan kebijakan media yang ada. *SINDOTV* diharapkan melaksanakan kebijakan sistem stasiun jaringan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya berlandaskan kepentingan ekonomi semata. Diperlukan sinergi yang baik antara *SINDOTV* dengan *PROTV* dalam melaksanakan sistem stasiun jaringan. *SINDOTV* seharusnya dapat mendukung dan memberikan kesempatan dalam pengembangan kegiatan penyiaran di *PROTV* sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan sistem stasiun jaringan yang mengutamakan kepentingan publik.

Dalam mewujudkan sistem stasiun jaringan diperlukan dukungan dari pihak terkait, seperti pemerintah, KPI, dan KPID. Sebagai regulator di tingkat daerah KPID diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya dalam memantau dan mengawasi praktik sistem stasiun jaringan. Diharapkan KPID dapat berperan strategis dalam implementasi sistem stasiun jaringan agar mampu mewujudkan *diversity of content* dan *diversity of ownership* demi kepentingan publik lokal.

Implikasi Sosial

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan gambaran adanya tarik menarik antara kepentingan ekonomi dan politik. Berdasarkan temuan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai implementasi sistem stasiun jaringan dan keberadaan program siaran lokal yang belum ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Baker, C Edwin. (2007). *Media Concentration and Democracy Why Ownership Matters*. New York: Cambridge University Press.

Denzin and Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitatif Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Goodin, E Robin, (2006). *The Oxford Handbooks of Political Science*. New York: Oxford University Press Inc

Faizal Noor, Henry. (2010). *Ekonomi Media*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ishadi SK. (2014). *Media & Kekuasaan Televisi, Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta: Kompas

Joseph Straubhaar, Robert LaRose, Lucinda Davenport. (2012). *Media Now Understanding Media, Culture, and Technology Seventh Edition*. USA: Wadsworth.

Kitley, Philip. (2000). *Television, nation, and culture in Indonesia*. USA: Ohio University Center for International Studies.

Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran Dari Otoriter Ke Liberal*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Mosco, Vincent. (2009). *The Political Economy of Communication*, London: Sage.

Rianto, Puji dan kawan-kawan (2012). *Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa.

Sen, Krishna and David T. Hill, (2000). *Media, Culture and Politics In Indonesia*. Jakarta: PT. Equinox Publishing Indonesia.

Sudiby, Agus. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.

Turow Joseph. (2009). *Media Today An Introduction to Mass Communication*. New York: Routledge.

Van de Donk. (2005). *Media Policy for the Digital Age*, Amsterdam: Amsterdam University Press.

Wasko, Janet, Graham Murdock, and Helena Sousa. (2001). *The handbook of political economy of communications*. United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd

Wilkin, Peter. (2001), *The Political Economy of Global Communication An Introduction*. London: Pluto Press

Yin, Robert K. (2006). *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press.

Referensi Tesis:

Mardiana, Lisa (2011). *Ekonomi Politik Regulasi Penyiaran (Implementasi Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan Ekonomi Politik Regulasi Penyiaran)*. Tesis. Universitas Diponegoro.

Mumpuni, Agung (2011). Implementasi Regulasi Kepemilikan dan Isi Siaran Sistem Stasiun Jaringan SUN TV Network. *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Referensi Internet:

Supriyono,(2013) *Daftar televisi lokal di Jawa Tengah*. <http://informasi-daftar.blogspot.com/2013/07/nama-nama-tv-lokal-di-jawa-tengah.html>, Diunduh pada 30 Januari pukul 21.24 WIB.

Rinaldoaldo (2014). *Keberadaan TV Lokal Sudahkah Menjadi Aspirasi*. <http://chirpstory.com/li/183487>. Diunduh pada 23 April pukul 17.45 WIB.

Widodo, Yohanes (2014). *Sistem Stasiun Jaringan-Quo Vadis*. Dalam <http://www.masboi.com/2010/06/sistem-stasiun-jaringan-quo-vadis/>. Diunduh pada 24 April pukul 20.30 WIB.

<http://www.bchanneltv.com>. Diunduh pada 30 April pukul 20.00 WIB.

<http://www.cakrasemarangtv.com>. Diunduh 21 Juli 2014.

Referensi lain:

Mosco, Vincent. (2008) . *Current trends in the political economy of communication. Global Media Journal -- Canadian Edition, 1(1), 45-63.*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Company Profile *Kompas TV Jawa Tengah*, Juli 2014.

Company Profile *TVKU*, Maret 2014.

Company Profile *PROTV*, April 2014.